

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Pemikiran	19
1. Alur Pemikiran	19
2. Kerangka Konseptual	20
3. Kerangka Teoritis	24
F. Metode Penelitian.....	30
1. Pendekatan Masalah.....	30
2. Spesifikasi Penelitian	32
3. Jenis Data	33
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Teknik Analisis Data	36
G. Sistematika Penulisan.....	37
H. Orisinalitas Penelitian	38

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	41
1. Pengertian Sanksi Pidana	41
2. Teori-Teori dan Tujuan Pemidanaan	43
3. Tahapan Penegakan Hukum	50
B. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Palsu	53
1. Pengertian Keterangan Palsu dalam Perspektif Hukum.....	53
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Keterangan Palsu	55
3. Unsur-Unsur Turut Serta Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik.....	58
C. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	61
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	61
2. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT	62
3. Wilayah Kerja PPAT.....	63
4. Organisasi PPAT	65
D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik PPAT.....	67
1. Pengertian Kode Etik PPAT	67
2. Ruang Lingkup PPAT	67
3. Kewajiban PPAT.....	68
4. Larangan PPAT.....	70
5. Hal-Hal yang Dikecualikan.....	72
6. Sanksi PPAT	72
E. Tinjauan Umum Tentang Akta Jual Beli	74
1. Macam-Macam Akta	75
2. Bentuk Akta PPAT	77
3. Struktur Akta PPAT	80
4. Fungsi Akta PPAT	82
5. Pengertian Akta Jual Beli	84
F. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	87
1. Pengertian Hak Atas Tanah	87

2. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah	87
3. Jenis-jenis Peralihan Hak Atas Tanah	89
4. Hak Milik Atas Tanah.....	90
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	101
A. PPAT dapat Dikenakan Sanksi Pidana atas Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 336/Pid.B/2017/PN.Smn	101
B. Pertanggungjawaban PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Apabila Terbukti Turut Serta Melakukan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik.....	132
C. Langkah-Langkah Mitigasi Agar PPAT Tidak Terjerat Sanksi Pidana dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah	143
BAB IV PENUTUP	154
A. Kesimpulan.....	154
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	